

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL KOTA SEMARANG 2019



STATISTIK KETAHANAN SOSIAL KOTA SEMARANG 2019



STATISTIK KETAHANAN SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2019

No. Publikasi : 33740.2016
Katalog BPS : 4101029.3374
Ukuran Buku : 16 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : iv + 45 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Pengarah : Fachruddin Tri Ubajani, S.Si, M.Si
Penanggung Jawab : Nur Elvira Megasanti S.SE
Editor : Nur Elvira Megasanti S.SE
Penulis : Retno Dian Ika Wati S.ST, MM
Gambar Kulit : Retno Dian Ika Wati S.ST,MM

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Statistik Ketahanan Sosial merupakan Indikator yang mengukur dan menganalisis dampak sosial dari perubahan yang bersifat lintas sektoral. Perubahan tersebut disebabkan karena globalisasi, reformasi dan otonomi daerah. Penyediaan data Statistik Ketahanan Sosial ini akan sangat bermanfaat dalam mendiagnosa sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya.

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2019 ini menyajikan gambaran yang komprehensif terhadap masalah ketahanan sosial, yang meliputi Statistik Ketahanan Wilayah, Statistik Ketahanan Masyarakat, Statistik Ketahanan Ekonomi dan Statistik Ketahanan Politik dan Keamanan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan data sekunder dari instansi lain di luar BPS.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran dari pemakai data sangat kami harapkan demi kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Akhirnya kami berharap bahwa buku ini bermanfaat sebagai salah satu acuan dalam menentukan skala prioritas perencanaan program-program pembangunan.

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

K e p a l a,



Fachruddin Tri Ubajani
NIP. 19660911 198901 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Pengertian Ketahanan Sosial.....	3
1.3. Ruang Lingkup	3
BAB II STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	
2.1. Sejarah Singkat Wilayah Kota Semarang.....	6
2.2. Wilayah Geografis	7
2.3. Kondisi Sumber Daya Alam	10
2.4. Kondisi Lingkungan Hidup	13
BAB III STATISTIK KETAHANAN MASYARAKAT	
3.1. Jumlah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk	16
3.2. Angka Beban Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin ..	18
3.3. Ketenagakerjaan	20
3.4. Pendidikan	22
3.5. Kesehatan	25
3.6. Sosial Budaya	27
BAB IV STATISTIK KETAHANAN EKONOMI	
4.1. Tingkat Inflasi	30
4.2. Pertumbuhan Ekonomi	32
4.3. PDRB Perkapita	36
4.4. Kemiskinan	37
4.5. Ketahanan Pangan	38
BAB V STATISTIK KETAHANAN POLITIK DAN KEAMANAN	
5.1. Politik.....	41
5.2. Keamanan dan Ketertiban	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah Kota Semarang menurut Kecamatan	8
Tabel 2. Wilayah Kota Semarang Menurut Penggunaan Lahan dan Luasnya (Ha) Tahun 2019	11
Tabel 3. Persentase Rumah Menurut Jenis Atap Kota Semarang.....	14
Tabel 4. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang.....	17
Tabel 5. TPAK dan TPT Kota Semarang.....	21
Tabel 6. APK dan APM Kota Semarang Tahun 2019	23
Tabel 7. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Kota Semarang Tahun 2019	23
Tabel 8. Persentase Penduduk yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan	25
Tabel 9. Kontribusi Sektor PDRB menurut Lapangan Usaha Kota Semarang.....	34
Tabel 10. PDRB per Kapita Kota Semarang	35
Tabel 11. Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2019	37
Tabel 12. Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Kota Semarang Tahun 2015	38
Tabel 13. Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Jumlah Kejahatan yang Terselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) di Kota Semarang	43

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Persentase Penggunaan Sumber Air Minum Tahun 2019.....	14
Gambar 2.	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2015-2019.....	18
Gambar 3.	Piramida Penduduk Tahun 2019	19
Gambar 4.	Persentase Penduduk Usia 105 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019	25
Gambar 5.	Angka Kesakitan Kota Semarang	26
Gambar 6.	Laju Inflasi Nasional dan Kota Semarang	31
Gambar 7.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	33
Gambar 8.	Produksi Padi dan Beras di Kota Semarang	39
Gambar 9.	Jumlah Kejahatan menurut Jenis Kejahatan Tahun 2019	43



BAB I

PENDAHULUAN

<https://semarangkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Sebagai respon semakin kompleksnya permasalahan sosial dalam pembangunan nasional, terutama menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung, dibutuhkan informasi berupa data statistik terutama dibidang sosial. Data statistik tersebut akan digunakan untuk menganalisis ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai pengaruh yang mengancam stabilitas dan eksistensinya.

Penyediaan data statistik ketahanan sosial (Hansos) akan sangat bermanfaat bagi para perencana dan pembuat kebijakan dalam mendiagnosa sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Krisis multi dimensional yang sedang berlanjut serta pengaruh globalisasi yang terjadi, seperti kemajuan iptek dan perdagangan bebas diyakini mempunyai kontribusi yang berarti pada perubahan perilaku individu, keluarga dan pada gilirannya akan berpengaruh pada kondisi kehidupan masyarakat.

Pengaruh perubahan yang terjadi sedapat mungkin memberikan dampak yang positif pada kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah disepakati dan dianut bersama, atau dengan kata lain masyarakat memiliki ketahanan yang tangguh dalam menghadapinya. Namun diakui bahwa dalam menyikapi perubahan yang terjadi respon masyarakat berbeda antar kelompok dan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan masyarakat akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi, lingkungan, wawasan berpikir, kebebasan untuk menyalurkan aspirasi, politik, sosial budaya dan sebagainya. Faktor-



faktor tersebut perlu diterjemahkan dalam berbagai kegiatan statistik untuk mendapatkan potret ketahanan masyarakat dan trennya dari waktu ke waktu.

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2019 ini mencoba menjawab kebutuhan informasi statistik ketahanan sosial yang diperlukan, baik untuk kepentingan Nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/ Kota, terutama pada era pelaksanaan otonomi daerah saat ini.

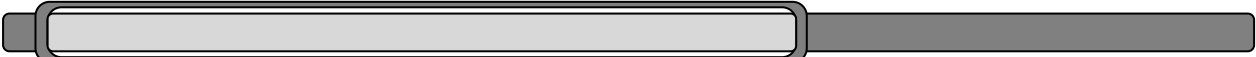
1.2. Pengertian Ketahanan Sosial

Walaupun belum ada kesepakatan tentang definisi yang pasti dari istilah ketahanan sosial, namun sebagai pendekatan, ketahanan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa/masyarakat berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai suatu fenomena yang dependen, tingkat ketahanan sosial di suatu wilayah tertentu dipengaruhi/ditentukan oleh berbagai fenomena/faktor independen seperti keadaan komunal, sosial dan lingkungannya. Ketahanan sosial suatu wilayah berawal dari ketahanan individu. Sedangkan ketahanan individu, secara kolektif akan menunjukkan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan ketahanan lingkungan.

1.3. Ruang Lingkup

Ketahanan sosial pada dasarnya memang sangat luas cakupannya, sebagaimana disebutkan terdahulu, yaitu dimulai dari ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan lingkungan dan



selanjutnya ketahanan wilayah. Sedangkan ketahanan nasional terbentuk dari sinergi masing-masing ketahanan wilayah.

Dikemukakan sebelumnya bahwa pengertian sosial adalah suatu hal yang berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan masyarakat itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Salah satu kelompok sosial adalah komunitas lokal atau masyarakat setempat. Dalam sosiologi, komunitas lokal diartikan sebagai bagian masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu. Interaksi penduduk di dalam wilayah ini lebih besar dibandingkan dengan penduduk diluar wilayahnya. Atas dasar ini, maka statistik dan indikator yang akan dikumpulkan dan disusun diarahkan untuk mendapatkan gambaran ketahanan wilayah pada unit Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Berbagai indikator yang relevan dengan ketahanan sosial akan disajikan dalam publikasi ini yang meliputi, statistik ketahanan wilayah, statistik ketahanan lingkungan serta statistik politik dan keamanan. Ketahanan suatu wilayah akan tergantung dari dinamika faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan, politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan di wilayah tersebut (internal) maupun wilayah sekitarnya (eksternal).

Tingkat ketahanan masyarakat menghadapi masalah-masalah perubahan sosial yang timbul perlu diketahui dan diukur. Ukuran tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dengan adanya pengukuran ini maka ketahanan/kerawanan suatu wilayah dapat diklasifikasikan, sedangkan yang bersifat kuantitatif, ukuran yang dimaksud dapat berupa indikator maupun indeks komposit.



BAB II
STATISTIK
KETAHANAN SOSIAL

<https://selingko.go.id>

BAB II

STATISTIK KETAHANAN WILAYAH

Ketahanan wilayah adalah situasi yang membuat masyarakat di suatu wilayah lentur dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah. Ancaman internal maupun eksternal mencakup ancaman terhadap fisik wilayah/lingkungan fisik, kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Suatu wilayah disebut memiliki ketahanan jika lingkungan fisiknya mendukung, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup baik dan ketahanan sosialnya juga kuat.

2.1. Sejarah Singkat Wilayah Kota Semarang

Untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap wilayahnya, maka pengetahuan akan sejarah berdirinya wilayah tersebut akan membuat rasa percaya diri dari masyarakat terhadap wilayah yang ditempatinya. Sehingga mereka akan mempunyai sikap rasa memiliki terhadap wilayahnya, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan atau eksistensi wilayah tersebut.

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki sejarah yang panjang. Mulanya dari daratan lumpur akibat dari sedimentasi Gunung Ungaran dan terus membentuk lapisan aluvial. Mengingat sejarah Kota Semarang sekitar 600 tahun yang lalu, Laksamana Cheng Ho mendaratkan kapalnya di Gedung Batu. Padahal daerah itu sekarang menjadi permukiman penduduk sampai masuk ke arah pantai sekitar 5 km.

Dimasa dulu, ada seorang dari kesultanan Demak bernama pangeran Made Pandan bersama putranya Raden Pandan Arang, meninggalkan Demak

menuju ke daerah barat disuatu tempat yang kemudian bernama Pulau Tirang, membuka hutan dan mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur, dari sela-sela kesuburan itu munculah pohon asam yang jarang (bahasa jawa : Asem Arang), sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang.

Pendiri desa tersebut kemudian menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar Kyai Ageng Pandan Arang I. Sepeninggalnya, pemimpin daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II. Di bawah pimpinan Pandan Arang, daerah Semarang semakin menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, maka diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan Kabupaten.

Pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 Masehi, Pandan Arang dinobatkan menjadi Bupati yang pertama oleh Sultan Pajang setelah melalui konsultasi dengan Sunan Kalijaga. Pada tanggal itu maka secara adat dan politis berdirilah Kota Semarang.

2.2. Wilayah Geografis

Kota Semarang terletak terletak antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Letak Kota Semarang tersebut hampir berada di tengah bentangan panjang Kepulauan Indonesia dari Barat dan Timur. Sedangkan ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 – 348,00 meter di atas garis pantai dan secara umum kemiringan tanah berkisar antara 0 persen sampai 40 persen (curam). Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,5 km. Sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Demak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang.

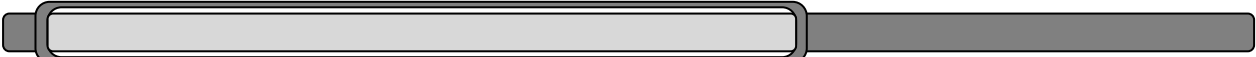
Kota Semarang sendiri mempunyai luas wilayah 373,70 km² yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen sebesar 57,55 km², diikuti oleh kecamatan Gunungpati dengan luas sebesar 54,11 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 5,93 km².

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Semarang menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	PERSENTASE (%)
1	Mijen	57,55	15,40
2	Gunungpati	54,11	14,48
3	Banyumanik	25,69	6,87
4	Gajahmungkur	9,07	2,43
5	Semarang Selatan	5,93	1,59
6	Candisari	6,54	1,75
7	Tembalang	44,20	11,83
8	Pedurungan	20,72	5,54
9	Genuk	27,39	7,33
10	Gayamsari	6,18	1,65
11	Semarang Timur	7,70	2,06
12	Semarang Utara	10,97	2,93
13	Semarang Tengah	6,14	1,64
14	Semarang Barat	21,74	5,82
15	Tugu	31,78	8,50
16	Ngaliyan	37,99	10,16
	J u m l a h	373,70	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang

Keadaan topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian, topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22 persen di wilayahnya dataran dengan kemiringan 2-5



persen dan 37,78 persen merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40 persen.

Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90-348 meter di atas permukaan Laut (MDPL) dan di dataran mempunyai ketinggian 0,75 – 3,5 MDPL. Bagian utara Kota Semarang merupakan daerah pantai dan dataran rendah yang dikenal dengan kota bawah, sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan yang biasa dikenal dengan Semarang Atas atau kota atas.

Kota bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung, pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, pemukiman, bangunan, kawasan industri dan tambak. Di samping itu, Kota bawah juga sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan, angkutan dan perikanan. Sedangkan kota atas struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku dan sebagian besar pemanfaatan lahannya untuk pemukiman, persawahan, perkebunan, kehutanan dan pusat kegiatan pendidikan.

Kondisi iklim di wilayah Kota Semarang adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Suhu udara berkisar rata-rata 28,08°C dengan temperatur rendah berkisar antara 20,1°C dan tertinggi berkisar 34,8 °C, dengan kelembaban udara rata-rata 76,61 persen.

2.3 Kondisi Sumber Daya Alam

Kota Semarang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan yang sangat berharga. Kota Semarang memiliki tanah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan/tambak, bahan-bahan material untuk bangunan dan lain-lain. Penggunaan tanah ini digunakan berdasarkan pada pola tata guna lahan yang terdiri dari perumahan, tegalan, kebun campuran, persawahan, tambak, hutan, perusahaan, jasa, industri dan bangunan lainnya.

Walaupun termasuk dalam kota metropolitan, namun Kota Semarang masih mempunyai wilayah yang berupa tanah persawahan dan perkebunan. Data dari dinas pertanian menunjukkan bahwa untuk luas tanah persawahan tahun 2019 ada sebanyak 2.396,6 hektar atau 6,41 persen dari luas kota Semarang, yang terdiri dari 1.046 hektar sawah irigasi dan 1.350 sawah tadah hujan. Selain lahan pertanian sawah, terdapat pula lahan pertanian bukan sawah yang luasnya mencapai 16.368 hektar (43,77 persen luas kota Semarang) dimana sebagian besar merupakan tegalan/kebun yang luasnya mencapai 7.868 hektar, penggunaan kedua terbesar adalah lahan nonpertanian yang digunakan untuk area tambak, kolam ataupun empang yang mencapai 3.831 hektar. Sedangkan area yang digunakan sebagai pemukiman, perkantoran, jalan, sungai dll ada sekitar 18.605 hektar atau sekitar 49,78 persen dari luas kota Semarang.

Tabel 2. Wilayah Kota Semarang Menurut Penggunaan Lahan dan Luasnya (Ha) Tahun 2019

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Lahan Sawah	2,396,6
a. Irigasi	1,046.4
b. Tadah hujan	1,350.4
Lahan Pertanian Bukan Sawah	16,368,5
a. Tegal/kebun	7,868,4
b. Ladang/huma	624,3
c. Perkebunan	814,0
d. Hutan rakyat	1,148,2
e. Padang penggembalaan/padang rumput	472.1
f. Hutan negara	1,535.8
g. Sementara tidak diusahakan *)	74,1
h. Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	3,831.6
LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)	18,605,1
Luas Wilayah	37,370.39

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2019

Potensi sumber daya air sangat penting dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam aktifitas kehidupan manusia. Sumber daya air yang ada di Kota Semarang meliputi air permukaan dan air dalam tanah. Air permukaan pada umumnya berupa sungai, baik sungai tetap maupun sungai tadah hujan. Sungai-sungai yang ada di Kota Semarang meliputi : Sungai Beringin, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Kaligarang, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali pengkol, Kali babon, kali Semarang, Kali Banger dan Kali Silandak.

Kaligarang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kaligarang mempunyai debit 53,0 % dari debit total, kali

Kreo 34,7 % selanjutnya kali Kripik 12,3 %. Oleh karena Kaligarang memberikan air yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan. Disamping itu Kaligarang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi warga Kota Semarang.

Sedangkan air bawah tanah merupakan air yang keberadaannya berada di dalam tanah dan menjadi kebutuhan hidup manusia. Air tanah bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya.

Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3-18 meter. Sedangkan untuk penduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20-40 meter.

Kebutuhan akan air bersih dari sumber daya air tanah untuk berbagai keperluan, baik untuk konsumsi rumahtangga maupun untuk industri dari tahun ketahun menunjukkan angka yang selalu meningkat sejalan dengan penggunaan air melalui PDAM. Jumlah pelanggan PDAM tahun 2019 untuk golongan rumahtangga sebanyak 155.774 rumahtangga atau 91,80 persen, sedangkan pelanggan lain dari kategori sosial, industri, instansi pemerintah dll sebanyak 13.910 pelanggan.

2.3 Kondisi Lingkungan Hidup

Keserasian pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Dengan pengertian sistemik semacam itu maka penguraian lingkungan hidup ke dalam komponen-komponennya yang lebih kecil, serta analisis yang mengikuti uraian terhadap unsur-unsur lingkungan hidup itu kemudian, mestinya juga akan merefleksikan keterkaitan unsur lingkungan hidup itu secara tak terlepas dari yang lainnya. Oleh sebab itu lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan (tata ruang).

Selain mencermati dari sisi tata ruang, kualitas dan fasilitas perumahan menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya. Pada tahun 2019, 68,2 persen rumahtangga di Kota Semarang menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri. Kemudian rumahtangga dengan status mengontrak/sewa 14,8 persen, selanjutnya status bebas sewa dan rumah dinas sebanyak 15,5 persen, dan sisanya dengan status lainnya sebesar 1,5 persen.

Atap rumah merupakan salah satu unsur rumah yang sangat vital. Tidak saja berfungsi sebagai pelindung terhadap panas matahari dan hujan, atap rumah menurut jenisnya juga berpengaruh pada kesehatan bagi

penghuninya. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 2,5 persen rumah beratap beton, kemudian 72,4 persen beratap genteng dan 25,1 beratap asbes/seng/lainnya.

Tabel 3. Persentase Rumah Menurut Jenis Atap Kota Semarang

Jenis Atap	2018	2019
(1)	(2)	(3)
1. Beton	4,00	2,5
2. Genteng	72,7	72,4
3. Asbes	21,1	23,6
4. Seng/kayu/lainnya	2,28	1,4

Sumber : Susenas, Data Diolah BPS Kota Semarang

Fasilitas air bersih merupakan salah satu indikator ketahanan lingkungan. Pada tahun 2019 persentase rumahtangga di Kota Semarang yang menggunakan air kemasan dan ledeng sebesar 82,3 persen, sedangkan sisanya menggunakan air dari sumur, mata air dan lain-lain.

Gambar 1. Persentase Penggunaan Sumber Air Minum Tahun 2019



Sumber : Susenas, Data Diolah BPS Kota Semarang



BAB III

STATISTIK

KETAHANAN MASYARAKAT

<http://semarangkota.dns-go.id>

BAB III

STATISTIK KETAHANAN MASYARAKAT

Ketahanan masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ketahanan sosial, karena masyarakat adalah makhluk sosial sehingga interaksi di dalam masyarakat merupakan salah satu proses sosial. Faktor manusia menjadi penentu dalam hal ketahanan sosial, karena manusia bukan saja sebagai obyek atau sasaran namun sekaligus juga sebagai subyek atau pelaksana pembangunan. Dengan demikian kondisi sumber daya manusia menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat sampai seberapa jauh ketahanan sosial bisa dilihat. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia diperlukan karena jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal atau aset pembangunan jika kualitasnya baik. Sebaliknya, hanya akan menjadi beban manakala kualitasnya rendah.

3.1. Jumlah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.814.110 jiwa. Dengan jumlah sebesar itu Kota Semarang termasuk dalam 5 besar Kabupaten/Kota yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Propinsi Jawa Tengah, sedangkan 4(empat) wilayah lainnya adalah Kabupaten Brebes, disusul Kabupaten Cilacap kemudian Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tegal.

Meskipun dari tahun ke tahun jumlah penduduk kota semarang diproyeksikan terus bertambah akan tetapi laju pertumbuhan penduduk

selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan melambat dari 1,68 persen di tahun 2015 dan semakin melambat hingga mencapai 1,57 persen di tahun 2019.

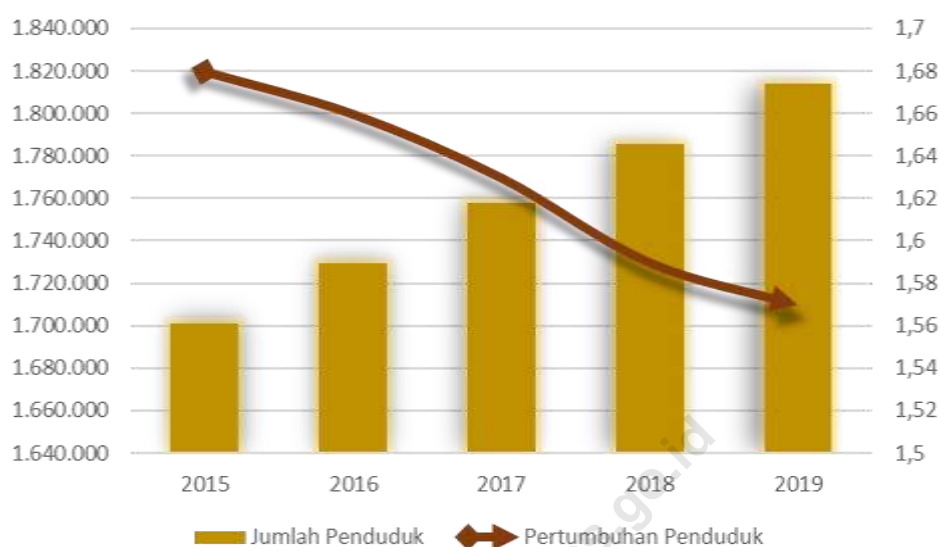
Potensi permasalahan jumlah penduduk yang besar dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang dimiliki. Bila jumlah penduduk besar sedangkan tingkat pertumbuhannya tinggi, maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya menjadi sangat berat, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan ketahanan wilayah/sosialnya.

Tabel 4. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2015	1.701.172	1,68
2016	1.729.428	1,66
2017	1.757.690	1,63
2018	1.785.600	1,59
2019	1.814.110	1,57

Sumber: Proyeksi Penduduk Kota Semarang

Gambar 2. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2015-2019



Sumber: Proyeksi Penduduk Kota Semarang

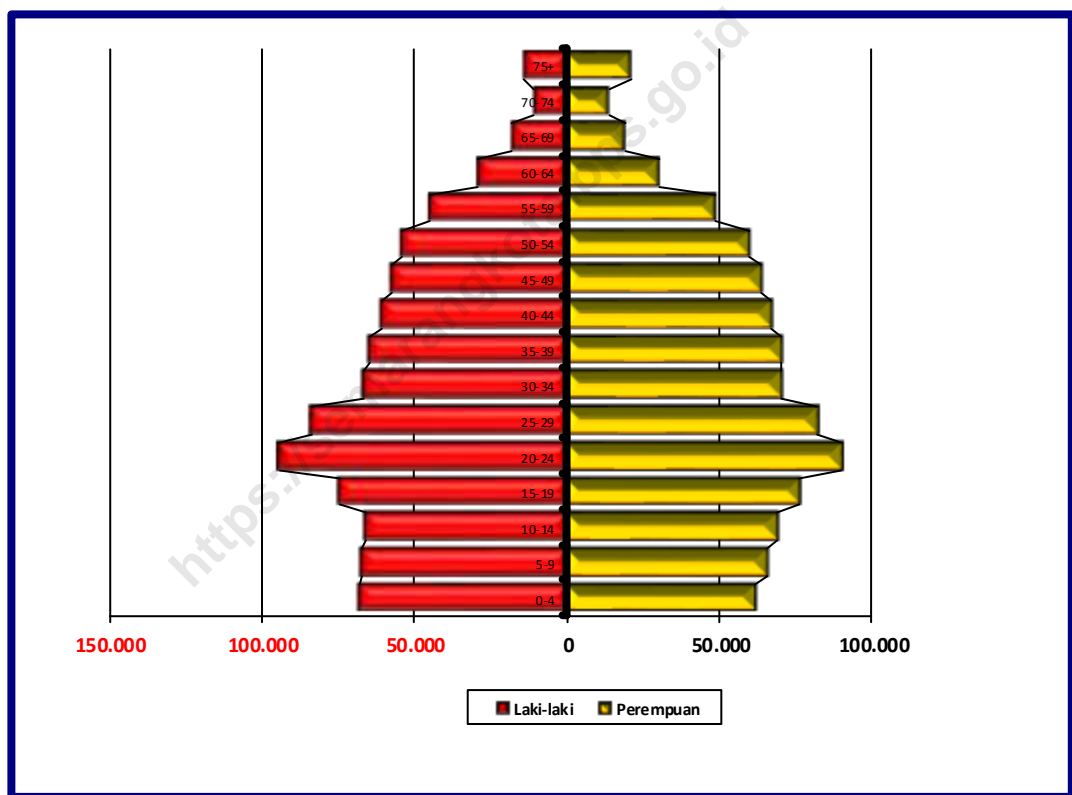
3.2. Angka Beban Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin

Selain jumlah, kepadatan maupun pertumbuhan penduduk, hal lain yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, antara lain komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dikatakan penting karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Kelahiran menurut jenis kelamin jelas berbeda, pada saat dilahirkan umumnya jumlah bayi pria lebih banyak dari bayi wanita. Dari kedua variabel tersebut, yaitu umur dan jenis kelamin akan dapat dihitung indikator angka beban ketergantungan dan rasio jenis kelamin, dimana kedua indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan wilayah/sosial dari suatu wilayah kota dan atau dalam satu rumahtangga

Angka beban ketergantungan merupakan perbandingan antar jumlah penduduk yang produktif (15 – 64 tahun) dengan yang tidak produktif (0 –

14 tahun dan 65 tahun keatas). Angka beban ketergantungan memberikan gambaran seberapa jauh penduduk yang berusia produktif/aktif secara ekonomi harus menanggung penduduk yang belum produktif dan pasca produktif. Untuk penduduk yang mempunyai struktur muda atau sangat tua sekali, maka beban ketergantungannya sangat tinggi. Di negara-negara berkembang karena struktur umur penduduknya muda, maka angka beban ketergantungannya biasanya relatif tinggi.

Gambar 3. Piramida Penduduk Tahun 2019



Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kota Semarang

Angka beban ketergantungan untuk Kota Semarang pada tahun 2018 sebesar 38,21 persen, sedangkan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 30,80 persen dan angka ketergantungan penduduk tua sebesar 7,41 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, angka beban ketergantungan total, ketergantungan muda maupun ketergantungan tua di

tahun 2019 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yakni masing-masing sebesar 37,04 persen, 29,27 persen 7,77 persen.

Selain menurut umur komposisi penduduk juga dapat dilihat menurut jenis kelamin. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Dari 1.814.110 jiwa penduduk Kota Semarang pada tahun 2019, sebanyak 889.298 jiwa diantaranya adalah penduduk laki-laki dan 924.812 penduduk perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Semarang sebesar 96 , yang artinya jumlah penduduk perempuan 4 persen lebih banyak dari penduduk laki-laki atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

3.3. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan juga merupakan salah satu hal yang mempunyai pengaruh terhadap ketahanan sosial. Misalnya tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah akan memberikan dorongan yang kuat (potensi) bagi munculnya berbagai ketidakpuasan atas beragam kebijakan pembangunan (terutama dibidang ekonomi), yang kemudian dapat memicu terjadinya konflik antar berbagai pihak, baik pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, dan antar masyarakat sendiri. Frekuensi konflik yang timbul dan eskalasinya menunjukkan/mengindikasikan seberapa kuatnya ketahanan wilayah/sosial masyarakat yang ada. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat dianggap paling relevan (terutama bagi indikator penyebab/input) dalam menggambarkan kondisi ketahanan wilayah/sosial, khususnya dibidang ketenagakerjaan.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi salah satunya diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK terlihat mengalami peningkatan selama periode 2018-2019, yaitu dari 65,56 persen menjadi 66,42 persen.

Tabel 5 TPAK dan TPT Kota Semarang

Indikator		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)		(2)	(3)
TPAK	Laki-laki	77,79	76,26
	Perempuan	54,09	57,19
	Total	65,56	66,42
TPT	Laki-laki	6,84	4,12
	Perempuan	3,20	5,07
	Total	5,29	4,54

Sumber : Sakernas 2018-2019

Peningkatan angkatan kerja ini mengisyaratkan akan perlunya lapangan pekerjaan yang cukup banyak guna menampung banyaknya penawaran angkatan kerja. Bila dilihat menurut jenis kelamin seperti pada tabel 5, TPAK perempuan sedikit mengalami peningkatan tetapi TPAK laki-laki mengalami penurunan. Besarnya TPAK laki-laki pada tahun 2018 adalah 77,79 persen turun menjadi menjadi 76,26 persen pada tahun 2019, dan TPAK perempuan yakni dari 54,09 persen menjadi 57,19 persen.

Disamping itu indikator lain yang cukup penting dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran, dimana dapat menunjukkan sampai sejauh mana angkatan kerja yang ada terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja pada tahun 2019 sebesar 4,54 persen sedangkan pada tahun 2018 sebesar 5,29 persen. Bila dirinci menurut

jenis kelamin, TPT laki laki mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. TPT laki-laki di tahun 2018 sebesar 6,87 persen turun menjadi 4,12 persen di tahun 2019 dan untuk TPT perempuan sebesar 3,20 persen di tahun 2018 naik menjadi 5,07 persen di tahun 2019.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk baik laki laki ataupun perempuan yang masuk kedalam pasar kerja semakin menurun pada Tahun 2019, meskipun jumlah pasokan tenaga kerja dibandingkan tahun 2019 lebih banyak baik tenaga kerja laki-laki maupun perempuan.

3.4. Pendidikan

Kondisi sumber daya manusia dibidang pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya. Sebagai contoh semakin lama penduduk/anggota masyarakat menuntut ilmu/sekolah, semakin tinggi pemahamannya akan unsur kehidupan yang ada, sehingga diharapkan semakin arif dan bijaksana mereka hidup antar sesama. Dengan asumsi bahwa semakin lama penduduk suatu wilayah memperoleh pendidikan/bersekolah, ketahanan wilayah/sosialnya relatif semakin baik, maka indikator pendidikan yang dianggap relevan dengan ketahanan sosial adalah angka partisipasi sekolah, baik itu angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM), kemudian angka buta huruf, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Indikator partisipasi sekolah termasuk dalam indikator proses yang dalam pembahasan disini diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang

sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 6. APK dan APM Kota Semarang Tahun 2019

Uraian	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
APK	99,59	91,18	69,22
APM	103,98	91,81	106,63

Sumber : Susenas 2019, data diolah BPS Kota Semarang

Tabel 7. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kota Semarang Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	595	154.275	7.855	19,64
SMP/MTS	227	70.952	4.384	16,18
SMA/MA	199	74.800	4.822	15,51
Kota Semarang	1.021	300.027	17.061	17,58

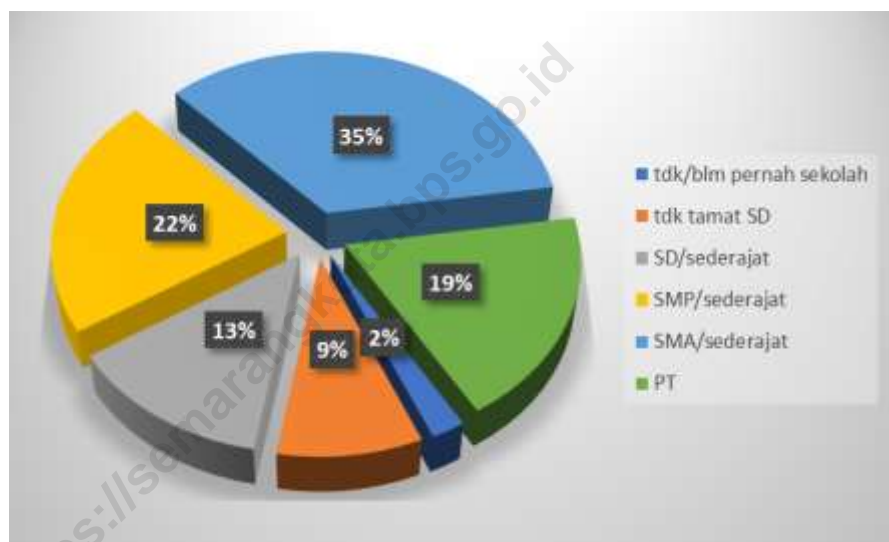
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kota Semarang 2019

Secara umum, ketahanan sosial masyarakat Kota Semarang di bidang pendidikan relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka rasio Murid-Guru di Kota Semarang tahun 2019 yang berkisar 17.58 yang berarti secara rata-rata setiap guru di Kota Semarang mengajar sekitar 17-18 siswa. Rasio Murid Guru di Kota Semarang untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 19,64 yang berarti satu orang guru rata-rata mengajar 19-20 murid, sedangkan tingkat SLTP/MTs secara rata-rata seorang guru menangani 16 murid dan tingkat SLTA/MA secara rata-rata seorang guru menangani 15 murid.

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2019 persentase penduduk

umur 10 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas telah mencapai 67,20 persen, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2017 sebesar 65,99 persen. Indikator ini juga sering digunakan dalam menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia yang didekati dengan rata-rata lama sekolah

Gambar 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2019



Sumber : Susenas 2019, data diolah BPS Kota Semarang

3.5. Kesehatan

Kondisi sumber daya manusia dibidang kesehatan juga ikut andil dalam melihat kondisi ketahanan wilayah/sosial penduduk di suatu wilayah tertentu. Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Kondisi kesehatan yang dalam hal ini diwakili dengan indikator angka kesakitan merupakan resultan dari berbagai aspek/kondisi yang dirasakan/dialami oleh masyarakatnya secara umum, yang dengan demikian dapat menjadi salah satu indikator yang baik untuk menggambarkan kondisi ketahanan wilayah/sosialnya.

Pada tahun 2019 status kesehatan penduduk tergambar dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan yang mencapai 25,87 persen di tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 26 persen penduduk Kota Semarang pernah mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan tersebut meliputi beberapa penyakit antara lain: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lainnya.

Tabel 8. Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan

Jenis Kelamin	Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)
1. Laki-laki	29,8	23,94
2. Perempuan	32,73	27,73
3. Laki-laki + Perempuan	31,29	25,87

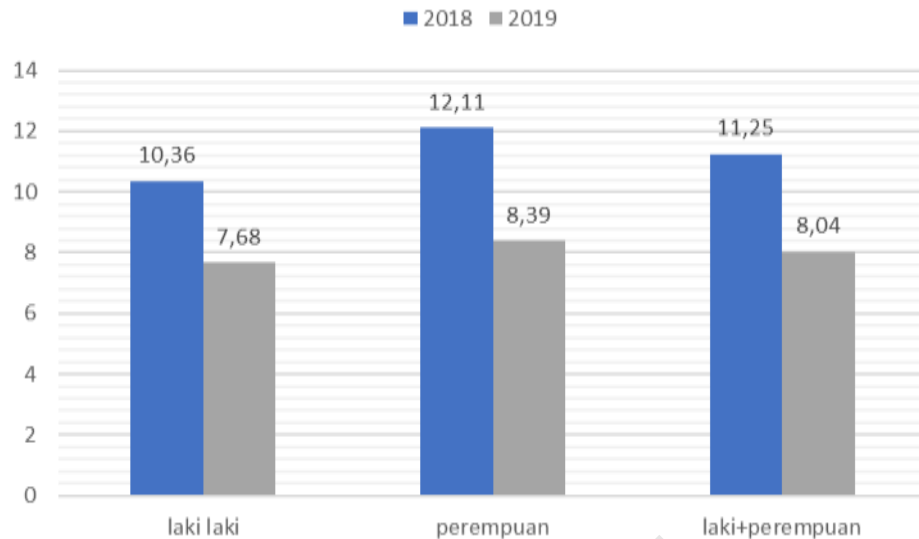
Sumber : Susenas 2019, data diolah BPS Kota Semarang

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan di tahun 2019 turun secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan belum tentu terganggu aktifitas sehari harinya. Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan hingga terganggu aktifitas sehari hari disebut sebagai Angka Kesakitan/ Morbiditas.

Angka morbiditas di tahun 2019 secara umum lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya baik laki laki maupun perempuan. Di tahun 2018 angka morbiditas laki laki sekitar 10,36 persen dan 12,11 persen untuk perempuan. Sedangkan di tahun 2019, angka morbiditas untuk laki laki sekitar 7,68 persen dan 8,39 persen untuk perempuan.

Gambar 5. Angka Kesakitan Kota Semarang




Sumber : Susenas 2019, data diolah BPS Kota Semarang

3.6. Sosial Budaya

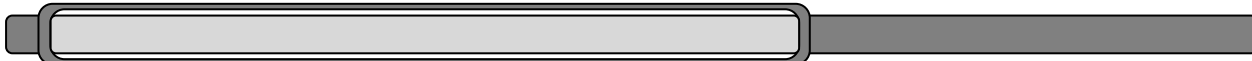
Dalam kurun waktu sejarah telah tercatat bahwa Kota Semarang telah mampu berkembang sebagai transformasi budaya, baik yang bersifat religi, tradisi, teknologi maupun aspirasi yang semuanya itu merupakan daya penggerak yang sangat besar nilainya dalam memberi corak serta memperkaya kebudayaan, kepribadian dan kebanggaan daerah yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya. Nilai-nilai agama yang universal dan abadi sifatnya merupakan salah satu aspek bagi kehidupan dan kebudayaan bangsa. Kota Semarang memiliki iklim yang kondusif bagi perkembangan berbagai ragam agama, khususnya dalam hal toleransi antar umat beragama.

Dari berbagai agama yang ada, data Kementerian Agama menunjukkan sebagian besar penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam 1.456.536 orang atau 86,99 persen, kemudian yang memeluk agama Kristen Katholik sebesar 87.440 orang atau 5,22 persen, agama Kristen Protestan sebesar

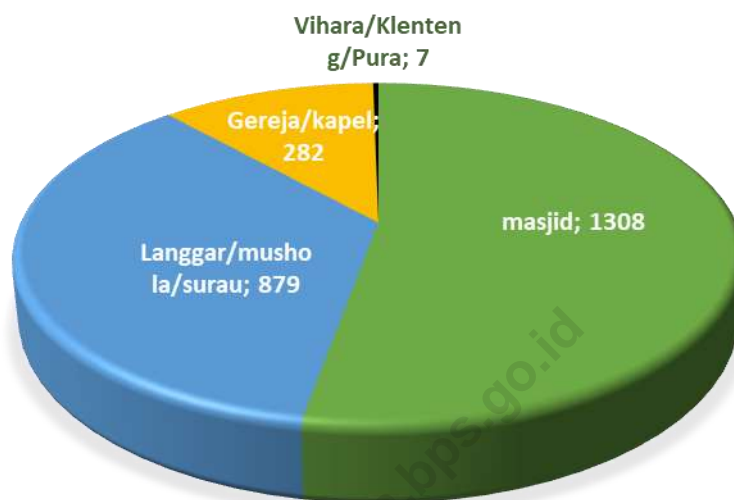


117.275 orang atau 7 persen, agama Budha sebanyak 11.423 orang atau 0,68 persen dan pemeluk agama Hindu sebesar 1.262 orang atau 5,08 persen. Keberagaman ini diakomodir dengan penyediaan fasilitas Tempat Ibadah dimana jumlah masjid di Kota Semarang sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 1.308 bangunan dan jumlah langar/mushola/surau ada sebanyak 879 bangunan. Sedangkan untuk jumlah gereja di tahun 2019 ada sebanyak 282 bangunan dan untuk vihara/klenteng/pura ada sebanyak 7 bangunan.

<https://semarangkota.bps.go.id>



Gambar 6. Banyaknya Tempat Ibadah Di Kota Semarang Tahun 2019



Sumber : Kemenag 2019

<https://semarangkota.bps.go.id>



BAB IV
STATISTIK
KETAHANAN EKONOMI

<https://selingangkotastats.go.id>

BAB IV

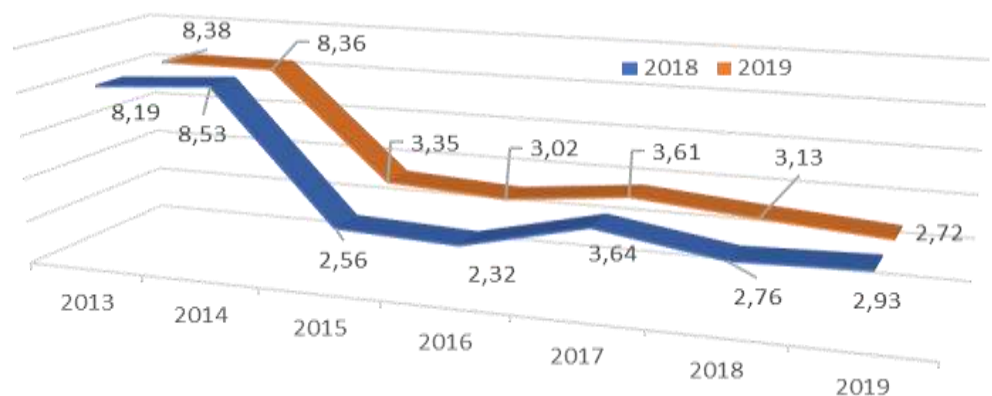
STATISTIK KETAHANAN EKONOMI

Kondisi perekonomian sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan wilayah/sosial masyarakat yang ada didalamnya. Kondisi perekonomian yang dimaksud adalah kondisi yang mencerminkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta kemiskinan. Keempat hal tersebut dimanifestasikan dengan beberapa indikator yang relevan, diantaranya untuk stabilitas ekonomi diwakili dengan angka inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk didalamnya pendapatan perkapita dan jumlah rumah tangga miskin yang mencerminkan ketahanan sosial dari masyarakat Kota Semarang.

4.1. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan sisi lain untuk melihat kondisi perekonomian. Perubahan harga yang terjadi dari waktu ke waktu menunjukkan stabilitas ekonomi suatu wilayah. Dalam kenyataannya naik turunnya inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif jasa-jasa publik dan pola konsumsi masyarakat pada periode tertentu serta pengaruh spekulasi. Tingkat inflasi yang tinggi dan tak terkendali akan merugikan perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan ekonomi bagi rakyat secara keseluruhan, dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kondisi ketahanan wilayah/sosial masyarakatnya.

Gambar 6. Laju Inflasi Nasional dan Kota Semarang



Sumber : BPS Kota Semarang

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2019 Kota Semarang lebih tinggi apabila dibandingkan angka inflasi Nasional, tercatat 2,93 persen untuk Kota Semarang dan 2,72 persen untuk angka inflasi Nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, inflasi Kota Semarang tahun 2019 sedikit lebih tinggi, akan tetapi untuk inflasi Nasional justru lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018

Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Nasional, inflasi Kota Semarang selama periode 2013 – 2019 cenderung lebih rendah kecuali pada periode 2014, 2017 dan 2019. Pada tahun tersebut angka inflasi Kota Semarang sebesar 8,53 3,64 dan 2,93 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 8,36, 3,61 dan 2,72 persen. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2015, 2016, 2018 angka inflasi Kota Semarang lebih rendah nilainya dibandingkan dengan angka inflasi Nasional, yaitu 8,19; 2,56 ; 2,32 dan 2,76 untuk Kota Semarang dan 8,38; 3,35 ;3,02 dan 3,13 untuk Nasional.

Selama tahun 2019 inflasi tertinggi terjadi pada bulan April dan Agustus yaitu sebesar 0.47 persen. Sedangkan di bulan September dan

Oktober Kota Semarang mengalami deflasi sebesar 0,18 di bulan September dan 0,16 di bulan Oktober. Secara umum dalam hal kestabilan harga Kota Semarang bisa dikatakan cukup baik, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap stabilitas perekonomian yang tentu saja berpengaruh terhadap ketahanan sosial dari masyarakatnya.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan demikian arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Neraca ekonomi regional bertujuan memberikan suatu gambaran statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perangkat pokok dalam neraca ekonomi regional. Secara lebih kongkret neraca ekonomi regional pada umumnya berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi yang dapat diukur atau dinilai dalam bentuk uang, antara lain mengenai tingkat produksi, nilai tambah dan agregat ekonomi makro lainnya yang memperoleh hasil kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan yang nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan tingkat harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan secara nyata pengaruh inflasi harus

dihilangkan. Oleh karena itu PDRB diestimasi dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan (tahun 2010). Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan perekonomian setiap tahun atau selama periode tertentu.

Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang



Sumber : BPS Kota Semarang

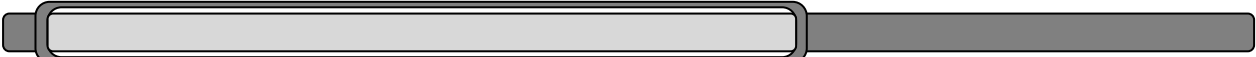
Dalam Tabel 9, terlihat sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang senantiasa mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan dari 5,82 persen di tahun 2015 menjadi 6,86 persen di tahun 2019, tahun 2018 terjadi sedikit pelemahan menjadi 6,52 dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 6,86 persen. Peningkatan tertinggi ada di periode 2017 dari 5,89 persen menjadi 6,7 persen di tahun berikutnya.

Tabel 9. Kontribusi Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang

Kategori	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2018	2019	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,84	0,81	0,78
B	Pertambangan dan Penggalian	0,18	0,17	0,11	0,12
C	Industri Pengolahan	26,65	27,88	25,32	25,70
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,12	0,12	0,12
E	Pengadaan Air	0,08	0,07	0,09	0,09
F	Konstruksi	26,63	26,36	25,98	25,59
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	13,87	13,78	14,77	14,62
H	Transportasi dan Pergudangan	3,79	3,85	3,69	3,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,43	3,45	3,29	3,24
J	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,22	10,60	11,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,48	4,43	9,96	3,82
L	Real Estate	2,89	2,94	3,12	3,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,67	0,71	0,65	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	3,21	3,00	2,91
P	Jasa Pendidikan	2,87	2,92	2,48	2,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,82	0,80	0,76
R,S,T	Jasa lainnya	1,19	1,23	1,20	1,23
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100

Sumber : BPS Kota Semarang

Gambaran lebih jauh struktur perekonomian Kota Semarang dapat dilihat berdasarkan dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Kota Semarang, Sektor Primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian adalah sebagai penyedia kebutuhan dasar dan bahan, peranannya tidak berselisih jauh menjadi 0,93 persen pada tahun 2017, dibanding dengan tahun 2017 yang sebesar 0,97 persen,



Demikian juga yang terjadi pada sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, Listrik dan air bersih serta sektor bangunan yang peranannya tidak berbeda jauh, yaitu dari 54,23 persen pada tahun 2018 menjadi 54,27 persen pada tahun 2019. Berbeda dengan sektor primer dan sekunder, sektor tersier yang sifat kegiatannya sebagai jasa, peranannya mengalami sedikit peningkatan, walaupun juga tidak berselisih jauh, yaitu dari 44,75 persen menjadi 44,74 persen pada tahun 2019, Sektor tersier ini terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya, Pada tahun 2019 sumbangan terbesar diperoleh dari sektor industri sebesar 27,44 persen, peranannya sedikit lebih tinggi dibanding sebelumnya yang mencapai 27,22 persen, Sumbangan dari sektor konstruksi merupakan terbesar kedua yaitu sebesar 26,83 persen pada tahun 2018 menurun menjadi 26,65 persen pada tahun 2019.

<https://semarang.kota.go.id>

4.3. PDRB Perkapita

Tabel 11. PBRB perkapita Kota Semarang

Tahun	PDRB per Kapita (000Rp)		Pertumbuhan (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan '10	Harga Konstan '10
(1)	(2)	(3)	(5)
2015	78.893	64.141	4,07
2016	85.045	66.823	4,18
2017	91.195	70.138	4,97
2018	98.214	73.521	4,82
2019	105.587	77.353	5,21

Sumber : BPS Kota Semarang

Apabila angka PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun diperoleh rata-rata produk yang dihasilkan atau pendapatan yang dibayarkan setiap penduduk daerah tersebut, Rata-rata ini disebut sebagai PDRB kapita, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, Bila pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.78.893.000- ;pada tahun 2019 telah mencapai Rp.105.587.000,- berarti telah terjadi peningkatan sekitar 30% dalam kurun waktu tersebut.

Memang disadari bahwa pendapatan perkapita belum mencerminkan pendapat penduduk yang sebenarnya, karena hanya menunjukkan kemampuan ekonomi daerah, selain itu juga belum dapat mencerminkan pemerataan pendapatan penduduk, Namun secara makro indikator ini masih bisa menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang erat

kaitannya dengan pola atau kekuatan dari ketahanan wilayah/sosial masyarakat.

4.4. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, Pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan kemiskinan makro dan kemiskinan mikro,

Data kemiskinan makro hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi dan tidak menunjukkan siapa dan dimana posisi penduduk miskin tersebut, Secara makro jumlah penduduk miskin tahun 2019 ada sebanyak 71.969 jiwa atau sebanyak 3,98 persen dari seluruh penduduk.

Untuk mengukur kemiskinan makro, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, Selain garis kemiskinan BPS juga mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*),

Indeks Kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Adapun garis kemiskinan tahun 2019 adalah sebesar Rp.474.930,- /kapita/bulan, Dengan indeks kedalaman kemiskinan adalah 0,57 persen dan indeks keparahan kemiskinan adalah 0,12 persen.

Tabel 12. Kemiskinan Kota Semarang tahun 2019

	Jml Penduduk Miskin (Dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Kota Semarang	71,96	3,98	0,57	0,12	474.930

Sumber : BPS Kota Semarang

Data kemiskinan mikro Kota Semarang diperoleh dari hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, data ini dapat menunjukkan nama dan alamat dari rumah tangga miskin sehingga dapat digunakan untuk penyaluran berbagai program penyaluran bantuan.

Tabel 13. Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Kota Semarang Tahun 2015

KATEGORI	Rawan Miskin Lainnya	Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Rumahtangga	29,861	17,405	13,819	8,662

Sumber : BPS Kota Semarang

Jumlah rumahtangga miskin di Kota Semarang pada tahun 2015 hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) sebesar 13,819 rumahtangga, Untuk kategori Sangat Miskin ada sebanyak 8,662 rumahtangga, hampir miskin ada sebanyak 17,405 rumahtangga dan rawan miskin ada sebanyak 29,861 rumahtangga.

4.5. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan juga menjadi salah satu indikator yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pangan dan konsumsi masyarakatnya, Kota Semarang sebagai kota besar tentu saja berkepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya, namun demikian permasalahan yang terjadi di kota Semarang tidak saja terkait dengan jumlah produksi pertanian khususnya pangan, Hal ini karena sumber daya alam kaitannya dengan areal persawahan dan perkebunan jelas tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang, Jadi permasalahan ketahanan pangan di Kota Semarang adalah dari sisi ekonomi yaitu jalur distribusi bahan kebutuhan pokok khususnya pangan, Olah karena itu untuk mengatasi ketahanan pangan, jalur yang harus ditempuh adalah memperbaiki dan memonitor jalur distribusi serta harga komoditas pangan yang masuk di Kota Semarang.

Produksi padi tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 27 ribu ton padi di tahun 2018 dan menurun menjadi 22 ribu ton di tahun 2019. Hal tersebut pastinya berimbas pada produksi beras yang menurun dari 15 ribu ton di tahun 2018 menjadi 12 ribu ton di tahun 2019.

Gambar 8. Produksi Padi dan Beras di Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang



BAB V

STATISTIK KETAHANAN

POLITIK DAN KEAMANAN

BAB V

STATISTIK KETAHANAN POLITIK DAN KEAMANAN

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan/potensi konflik di wilayah yang bersangkutan, Perkembangan kondisi politik khususnya sejak reformasi sangat pesat perkembangannya, dan berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya, Kondisi keamanan juga mengalami pergeseran kualitas maupun kuantitas, yaitu dengan adanya pergeseran global tentang paradigma keamanan yang terkait dengan ancaman konflik antar negara berbasis militer, berkecenderungan munculnya *transbational crime*, Dalam bagian ini akan diuraikan secara singkat kondisi ketahanan sosial di bidang politik dan keamanan meliputi kondisi politik, hukum, keamanan dan ketertiban serta bencana alam,

5.1. Politik

Perkembangan politik dewasa ini semakin cepat melebihi perkembangan ekonomi maupun perkembangan penduduk, Disadari bahwa sejak bergulirnya proses reformasi kondisi perpolitikan di tanah air mengalami revolusi baik dari sisi ideologi, organisasi politik maupun proses demokrasi, Kondisi ini menjadi latar belakang untuk mulai dikembangkan statistik politik yang sementara ini berpatokan pada tiga pilar utama sumber data statistik dasar bidang politik, Pilar pertama adalah rakyat/penduduk Warga Negara Indonesia, kaitannya dengan keragaman suku, bahasa, agama dan budaya, penduduk yang punya hak pilih, penduduk yang tidak punya hak pilih, penduduk yang tidak tercatat dan lain-lain, pilar kedua adalah partai politik itu sendiri dilihat dari mulai jumlah partai politik, banyaknya kantor cabang, banyaknya pengurus, banyaknya anggota, program kerja partai dan

lain-lain, dan pilar ketiga adalah pemilihan umum, pemilihan kepala daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, Data yang dikumpulkan dari mulai jumlah perolehan suara, anggota legislatif, jumlah suara, jumlah kursi dan lain-lain

Pada tahun 2019 jumlah anggota DPRD Kota Semarang sebanyak 50 orang, terdiri dari 38 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, Anggota DPRD ini terdiri dari 9 fraksi, yaitu Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi PDI, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB,, Sedangkan jumlah anggota dewan berdasarkan partai politik terdiri dari : 19 orang dari PDI, 3 orang dari Partai Golkar, 6 orang dari Gerindra, 6 orang dari partai Demokrat, 6 orang dari PKS, 2 orang dari partai PAN, 4 orang dari PKB, 2 orang dari Nasdem dan 2 orang dari PSI.

5.2. Keamanan dan Ketertiban

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat kepada status keamanan di suatu wilayah, Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat hal ini menuntut para pelaksana di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya,

Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) di Kota Semarang selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dimana kasus kejahatan sebanyak 1.309 kasus di tahun 2017, 887 kasus di tahun 2018 dan 1.669 kasus di tahun 2019, demikian pula dengan jumlah kejahatan yang terselesaikan sejumlah 656 kasus di tahun 2017 atau 50,11 persen di tahun 2017 kemudian di tahun 2018 jumlah kejahatan yang terselesaikan sebesar

530 kasus atau 59,75 persen dan terakhir di tahun 2019 jumlah kejahatan yang terselesaikan sebanyak 853 kasus atau 50,51 persen.

Tabel 4. Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Jumlah Kejahatan yang terselesaikan (*Crime Cleared*) di Kota Semarang

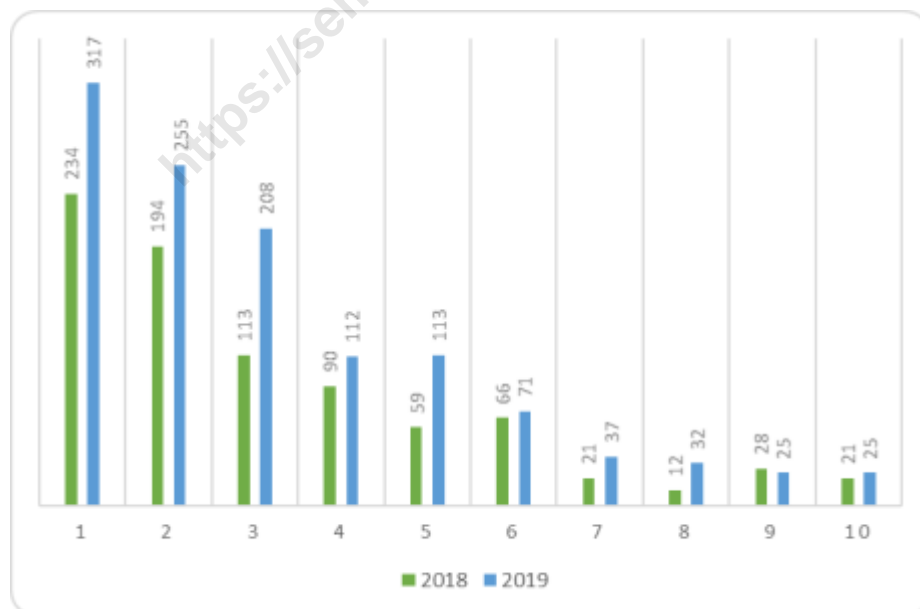
Uraian	2017	2018	2019
Jumlah Kejahatan	1.309	887	1.669
Jumlah yang terselesaikan	656	530	843

Sumber : Polrestabes Semarang

Apabila diuraikan berdasarkan jenis kejahatan, jumlah kasus yang paling banyak terjadi adalah Pencurian kendaraan bermotor (317 kasus) dan narkoba sebanyak 255 kasus,

Gambar 9. Jumlah Kejahatan menurut Jenis Kejahatan Tahun


2019



Sumber : Polrestabes Semarang

Keterangan:

1. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)
2. Narkoba

- 
3. Penggelapan
 4. Pencurian dengan Pemberatan (Curat)
 5. Penipuan/Perbuatan Curang
 6. Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)
 7. Penganiayaan Berat (Anirat)
 8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 9. Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)
 10. Penganiayaan Ringan (Anira)

<https://semarangkota.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://semarangkota.kab.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

ISBN 978-623-94845-5-2



9 786239 484552